

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

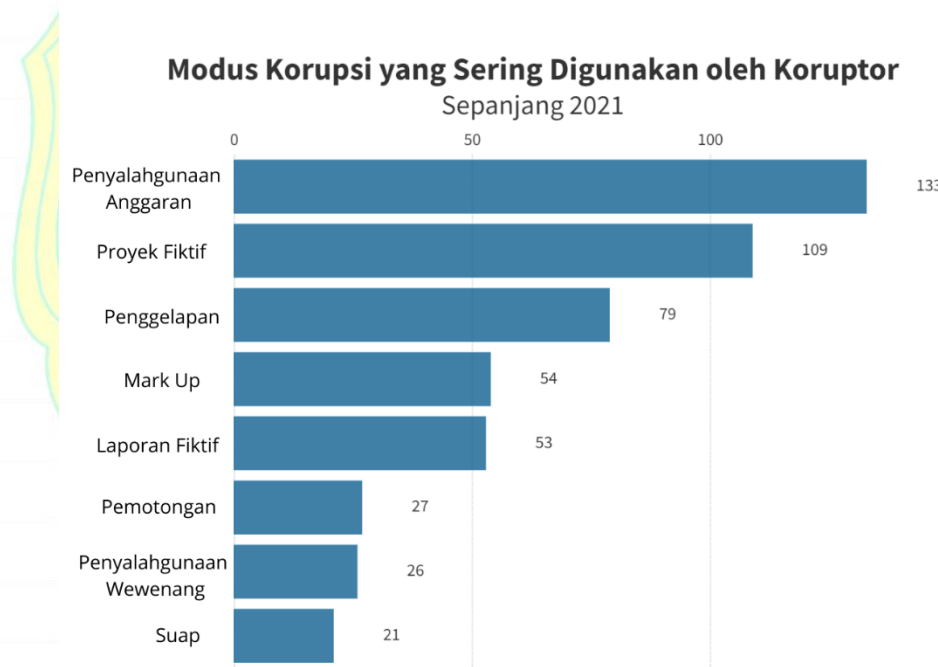
Bidang akuntan publik meningkat dengan cepat bersama dengan cepat bersamaan dengan perkembangan zaman. Sebagai pemangku kepentingan, masyarakat menjadi semakin kritis dan canggih, dan masyarakat selalu mengharapkan lembaga pemerintah, badan usaha milik negara dan daerah, serta organisasi publik berbeda yang sebagian besar menggunakan akuntan publik dalam pelaporannya akan bersikap transparan dan akuntabel (Safitri, 2019). Akuntabilitas dan transparansi sangat penting dalam operasional pengelolaan anggaran karena hasil akhir pengelolaan harus diungkapkan kepada publik dan direkonsiliasi.

Dalam pemerintahan sendiri, untuk menghadapi tuntutan masyarakat tersebut, terdapat beberapa peraturan terkait dengan akuntabilitas kinerja lembaga publik, yaitu Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta terdapat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sitta et al (2023) Upaya lain yang dilakukan adalah dengan mengoptimalkan sehingga berbagai mekanisme pelaporan dan peraturan kelembagaan dapat dibuat lebih efektif dan efisien bertujuan untuk menghasilkan perubahan struktural untuk tata kelola pemerintahan yang lebih baik (*good governance*). *Good governance* ialah sebuah teori yang menekan perlunya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik dalam pengelolaan pemerintahan. Dalam teori ini, transparansi merupakan komponen utama dari tata kelola yang baik guna meningkatkan kepercayaan publik dan efektivitas kinerja pemerintahan. Selain itu, terdapat juga teori *Principal – Agent* yang mana pada teori ini

menjelaskan hubungan antara dua pihak, yaitu *principal* yang mana dalam hal ini *principal* adalah masyarakat, dan *agent* adalah aparatur negara yang mengelola anggaran. Pada pelaksanaannya, transparansi sangat berperan penting karena dapat meminimalisir kesenjangan sebuah informasi diantara kedua pihak dan dapat mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran oleh *agent*. Selain itu juga adanya transparansi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Maka dari itu dalam pelaksanaan anggaran harus adanya akuntabilitas dan transparansi, yang mana pelaksanaan anggaran yang baik adalah salah satu bentuk nyata dari perwujudan *Good Governance*.

Salah satu akibat tidak adanya transparansi dalam pengelolaan pemerintahan adalah rawannya kasus penyalahgunaan anggaran atau kasus TIPIKOR (Tindak Pidana Korupsi).



Gambar 1.1 Statistik Korupsi di Indonesia

Sumber: ICW dalam Brigitta Raras 2022

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat sepanjang tahun 2020 ditemukan 444 kasus korupsi dengan nilai angka kerugian negara sebesar

Rp18,6 Triliun. Dan pada tahun 2021 terdapat 533 kasus korupsi dengan nilai angka kerugian negara sebesar Rp29 Triliun. Dan berdasarkan data diatas, terbukti penyalahgunaan anggaran menjadi kasus yang paling banyak digunakan oleh para koruptor dalam instansi pemerintah (Brigitta Raras, 2022).

Pengawasan dan pemantauan yang efektif sangat krusial bagi pengelolaan anggaran buat memastikan bahwa anggaran berjalan lancar dan tetap mencapai tujuan. Pengawasan bisa dilakukan dari internal yaitu atasan secara eksklusif dan divisi yang dikhususkan melakukan pengawasan di setiap divisi atau eksternal yaitu badan legislatif serta institusi pengawas spesifik yang dirancang agar mengatur perencanaan dan pelaksanaan anggaran, supervisi dalam alokasi biaya dibutuhkan bertujuan untuk mengerti perencanaan yang telah diatur bisa berjalan secara hemat, efektif serta efisien. Penerapan akuntansi yang baik serta sistem pengawasan yang baik didambakan mampu mengoreksi akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan sehingga berpengaruh terhadap kinerja instansi menjadi lebih optimal.

Menurut program *Monitoring Centre for Prevention* (MCP) merupakan aplikasi yang dibuat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melacak efektivitas program dalam pencegahan korupsi dengan meingkatkan tata kelola lembaga pemerintah, djelaskan bahwa upaya pengawasan yang memadai sangat penting untuk pencegahan korupsi karena tidak hanya mencakup pemantauan kepatuhan namun juga mengidentifikasi kelemahan dan meningkatkan tata kelola agar berfungsi lebih baik. Pada tahun 2020, mengingat sistem pengendalia intern pemerintah, Aparat Pengawasan Internal Pemerintahan (APIP), mempunyai peranan yang sangat penting, maka Direktorat Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Antikorupsi bekerja sama dengan Direktorat Koordinasi pengawasan KPK telah menyelenggarakan pelatihan Audit kejujuran bagi semua APIP di 34 Provinsi dan 514 Kab/Kota. Berlandaskan dengan capaian MCP pada tahun 2021 terkait indikator APIP masih berada pada tingkat 25,58%,- data tersebut menunjukkan terdapat banyak pekerjaan yang harus ditingkatkan (Rizky, 2021).

Selain transparansi dan pengawasan, sumber daya manusia (SDM) memegang peranan yang sangat signifikan dalam hasil kinerja dalam suatu instansi, yang mana pada setiap individu memiliki potensi untuk menghasilkan kinerja yang baik dan optimal (Kuntadi & Cheria Puspita, 2022). Oleh karena itu pengelolaan SDM yang baik diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja dari sebuah instansi.

Kinerja anggaran perlu dijadikan sebagai salah satu poin penting yang diperhatikan dalam setiap instansi pemerintah. Terdapat beberapa akibat yang dapat timbul dari kurang memperhatikan kinerja anggaran yaitu, mulai dari realisasi anggaran yang tidak sesuai dengan target yang telah di rencanakan yang berdampak pada turunnya nilai capaian kinerja keseluruhan instansi tersebut, pelaksanaan anggaran yang sudah direncanakan tidak berjalan dengan tepat sasaran sehingga pelaksanaan anggaran yang tidak reliable dan realisasi anggaran yang tidak maksimal hingga munculnya kasus penyalahgunaan dana anggaran dan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR).

Berdasarkan penelitian – penelitian terdahulu yang menguji kinerja anggaran sebagai variabel dependen terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja anggaran yaitu menurut Batubara & Risna (2020), Safitri (2019), Nata et al (2023), Sitta et al (2023), Achmad et al (2020), Amin et al (2022), Rigan & Purnama Sari (2019), mengungkapkan bahwa akuntabilitas berdampak positif terhadap kinerja anggaran, lalu menurut Batubara & Risna (2020), Safitri (2019), Achmad et al (2020), Rigan & Purnama Sari (2019), menjelaskan bahwa partisipasi berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran, faktor lainnya adalah sistem pengukuran kinerja yang berpengaruh positif menurut pendapat (Kuntadi & Cheria Puspita, 2022), dukungan organisasi yang berdampak positif kepada kinerja anggaran menurut (Kuntadi & Cheria Puspita, 2022), kualitas anggaran yang berdampak positif terhadap kinerja anggaran dan berdasarkan penjelasan (Siregar 2019), perencanaan anggaran yang berpengaruh positif kepada kinerja anggaran menurut (Mantiri et al., 2018) dan teknologi informasi yang berdampak positif terhadap kinerja anggaran menurut (Mantiri et al., 2018).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang menguji transparansi terhadap kinerja anggaran, menurut Safitri (2019), Achmad et al (2020), Amin et al (2022), Rigian & Purnama Sari (2019), Zahra et al (2023) menjelaskan bahwa transparansi berkaitan positif kepada kinerja anggaran. Namun, bertolak belakang kepada hasil penelitian yang dikerjakan oleh Nata et al (2023), Sitta et al (2023), menjelaskan bahwa transparansi tidak ditemukan peran yang signifikan dengan kinerja anggaran. Kemudian, terdapat penelitian terdahulu yang menguji pengaruh pengawasan terhadap kinerja anggaran. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Batubara & Risna (2020), Safitri (2019), Sitta et al (2023), Amin et al (2022), menyatakan bahwa pengawasan berdampak positif kepada kinerja anggaran. Namun, tidak sama dengan penelitian yang dikerjakan oleh Rigian & Purnama Sari (2019) yang mengungkapkan agar pengawasan tidak memiliki dampak yang signifikan kepada kinerja anggaran. Kemudian, terdapat penelitian terdahulu yang menguji pengaruh faktor individual terhadap kinerja anggaran. Menurut penelitian yang dikerjakan oleh Kuntadi & Cheria Puspita (2022), Siregar (2019), menyatakan bahwa faktor individual memiliki pengaruh positif dengan kinerja anggaran. Namun, tidak sama kepada penelitian yang dikerjakan oleh Mantiri (2018), menyatakan bahwa faktor individual tidak memiliki pengaruh yang signifikan untuk kinerja anggaran.

Terdapat kesenjangan studi antara transparansi, pengawasan, dan faktor individual dengan kinerja anggaran pada studi-studi sebelumnya, yang dibuktikan dengan temuan yang tidak konsisten atau bertentangan. Hasilnya, Peneliti mengerjakan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Transparansi, Pengawasan, dan Faktor Individual Terhadap Kinerja Anggaran pada Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara”**.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) ialah salah satu instansi pemerintah non divisi yang berkedudukan resmi dibawah dengan bertanggungjawab terhadap presiden. BKN merupakan salah satu instansi pemerintah yang mengatur dan mengawasi kebijakan kepegawaian dan semua urusan ASN, khususnya dalam penerimaan, pengadaan, pengembangan dan pemutusan hubungan kerja ASN.

BKN menjadi sebuah instansi pemerintah yang menaungi seluruh ASN di Indonesia bahkan seluruh kementerian di Indonesia

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka diajukan beberapa pertanyaan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh transparansi terhadap kinerja anggaran pada Kantor Pusat BKN?
2. Bagaimana pengaruh pengawasan terhadap kinerja anggaran pada Kantor Pusat BKN?
3. Bagaimana pengaruh faktor individual terhadap kinerja anggaran pada Kantor Pusat BKN?
4. Bagaimana pengaruh transparansi, pengawasan dan faktor individual secara simultan terhadap kinerja anggaran pada Kantor Pusat BKN?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah diajukan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji dan menganalisis serta mengetahui pengaruh transparansi terhadap kinerja anggaran pada Kantor Pusat BKN
2. Menguji dan menganalisis serta mengetahui pengaruh pengawasan terhadap kinerja anggaran pada Kantor Pusat BKN
3. Menguji dan menganalisis serta mengetahui pengaruh faktor individual terhadap kinerja anggaran pada Kantor Pusat BKN
4. Menguji dan menganalisis serta mengetahui pengaruh transparansi, pengawasan dan faktor individual terhadap kinerja anggaran secara simultan pada Kantor Pusat BKN

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain dapat memberikan masukan bagi beberapa pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menetap sebagai sebuah informasi tambahan di bidang kinerja anggaran pada instansi sektor publik khususnya dalam masalah transparansi, pengawasan dan faktor individu sehingga masyarakat menjadi semakin paham bahwa kinerja anggaran sangat penting. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian – penelitian selanjutnya mengenai kinerja anggaran.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pegawai Kantor Pusat BKN

Temuan penelitian ini ditargetkan dapat menyampaikan gambaran kepada pegawai kantor pusat BKN dalam merumuskan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja anggaran, memastikan anggaran tetap berjalan sesuai rencana, dan mencegah situasi yang dapat merugikan organisasi atau negara.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diinginkan dapat menyampaikan informasi dengan pengetahuan kepada masyarakat khususnya perihal dengan kinerja anggaran, yang mana anggaran merupakan bagian dari akuntansi sektor publik sehingga masyarakat dapat lebih kritis mengenai kinerja anggaran dari instansi – instansi sektor publik.

c. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diinginkan mampu menjadi sebuah data tambahan di bidang kinerja anggaran pada instansi sektor publik dan sebagai referensi untuk penelitian – penelitian selanjutnya mengenai kinerja anggaran.